



SAATNYA PARPOL & CAPRES BICARA PAJAK



LAPORAN HASIL SURVEI
PAJAK & POLITIK

2023



“

Kurang lebih 80% pendapatan negara bersumber dari perpajakan. Tanpa perpajakan, agenda pembangunan yang diusung parpol dan capres tidak mungkin dapat dijalankan.

Saatnya bicara pajak lebih mendalam!

”

Daftar isi

Daftar Isi	2
Metode Survei	3-4
Profil 2.080 Responden	5-11
Klaster Pertanyaan Survei:	
• Klaster 1: Pemahaman Soal Pajak	12-19
• Klaster 2: Perpajakan Harus Dibicarakan dalam Pemilu	20-25
• Klaster 3: Kerelaan Membayar Pajak	26-40
• Klaster 4: Pajak Memengaruhi Pilihan dalam Pemilu	41-43
Temuan Menarik dalam Survei	44-51
Komentar Responden	52-55

Metode Survei

Pengumpulan data dilaksanakan secara daring melalui kuesioner dalam *Google Forms*. Penyebaran tautan (*link*) kuesioner kepada pembaca DDTCNews dilakukan lewat situs web dan media sosial.

Pengisian kuesioner berlangsung secara sukarela (*voluntary*) pada 4 September 2023 hingga 4 Oktober 2023. Pada periode tersebut, sebanyak 2.080 pembaca DDTCNews telah menjadi responden dan mengisi kuesioner *online*.

Sebagai informasi, jumlah pembaca DDTCNews – diwakili dengan indikator *users* dalam *Google Analytics* – tercatat sebanyak 309.393 (pada periode survei tersebut) atau 5,22 juta (setahun

terakhir). Artinya, margin kesalahan (*margin of error*) sekitar 2,19% dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) sebesar 95%.

Menggunakan populasi pembaca DDTCNews, survei ini tidak difokuskan untuk mencari keterwakilan, baik keseluruhan orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun calon pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

Lebih dari itu, survei ditujukan untuk menggali pandangan dari masyarakat melek pajak serta kontributor dalam pendapatan negara sesuai dengan profil pembaca DDTCNews. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam survei ini cukup strategis untuk dipertimbangkan.



Adapun aspek terkait dengan demografi dan karakteristik yang menjadi profil pembaca DDTCNews antara lain:



Generasi Muda Mendominasi

Berdasarkan pada data *Google Analytics*, mayoritas pembaca (*users*) DDTCNews merupakan generasi Z dan Y (milenial), yakni sebanyak 70,9%. Menariknya, meskipun tidak ditujukan untuk mewakili, mayoritas pemilih dalam pemilu 2024 juga berasal dari kedua generasi tersebut.



Profesi Beragam

Berdasarkan pada hasil survei pembaca (2020), latar belakang profesi pembaca DDTCNews beragam. Karyawan swasta mencatatkan porsi terbanyak, yakni 41,3%. Sisanya, ada mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), konsultan pajak, dosen, *freelancer*, *entrepreneur*, dan lainnya.



Bidang Perpajakan Mendominasi

Berdasarkan pada hasil survei pembaca (2020), mayoritas pembaca DDTCNews berkecimpung pada bidang perpajakan. Porsinya sebanyak 79,9%. Dengan demikian, para pembaca DDTCNews cukup memahami perkembangan dunia perpajakan, terutama di Indonesia.



Masyarakat Melek Pajak

Pembaca DDTCNews termasuk masyarakat melek pajak. Terlebih, di antara mereka juga membantu wajib pajak karena berprofesi sebagai konsultan. Sebanyak 90,7% responden survei ini sangat dan cukup paham mengenai hak serta kewajiban wajib pajak.



Lulusan Pendidikan Tinggi

Mayoritas pembaca DDTCNews menamatkan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil survei ini, yakni sebanyak 52% responden merupakan lulusan D-4/S-1. Sebanyak 16% lulusan S-2/S-3 dan 15% lulusan D-1 hingga D-3.

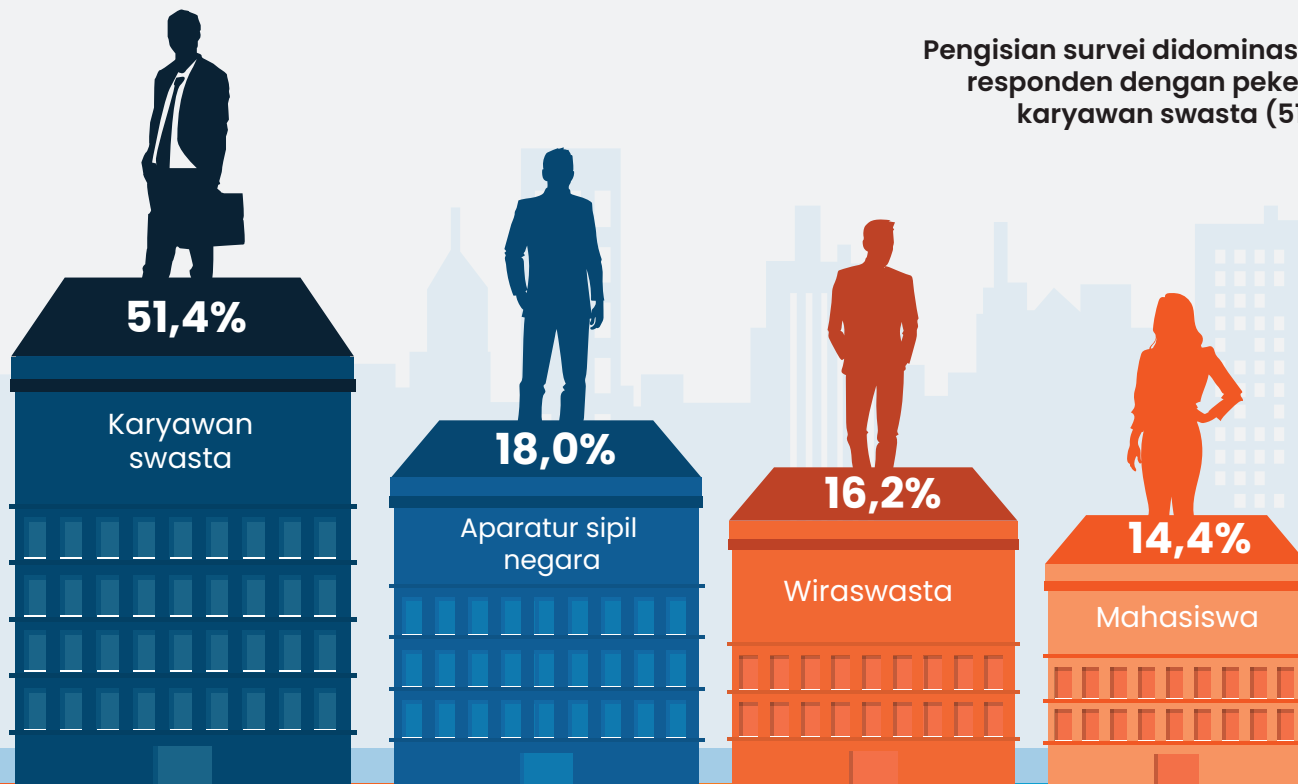
Dari gambaran profil tersebut, responden diharapkan mewakili masyarakat yang selama ini turut memengaruhi dinamika perpajakan Indonesia. Pandangan responden bisa menjadi masukan untuk para pemangku kebijakan, termasuk calon presiden dan calon anggota legislatif selanjutnya.



Profil 2.080 Responden

Pekerjaan

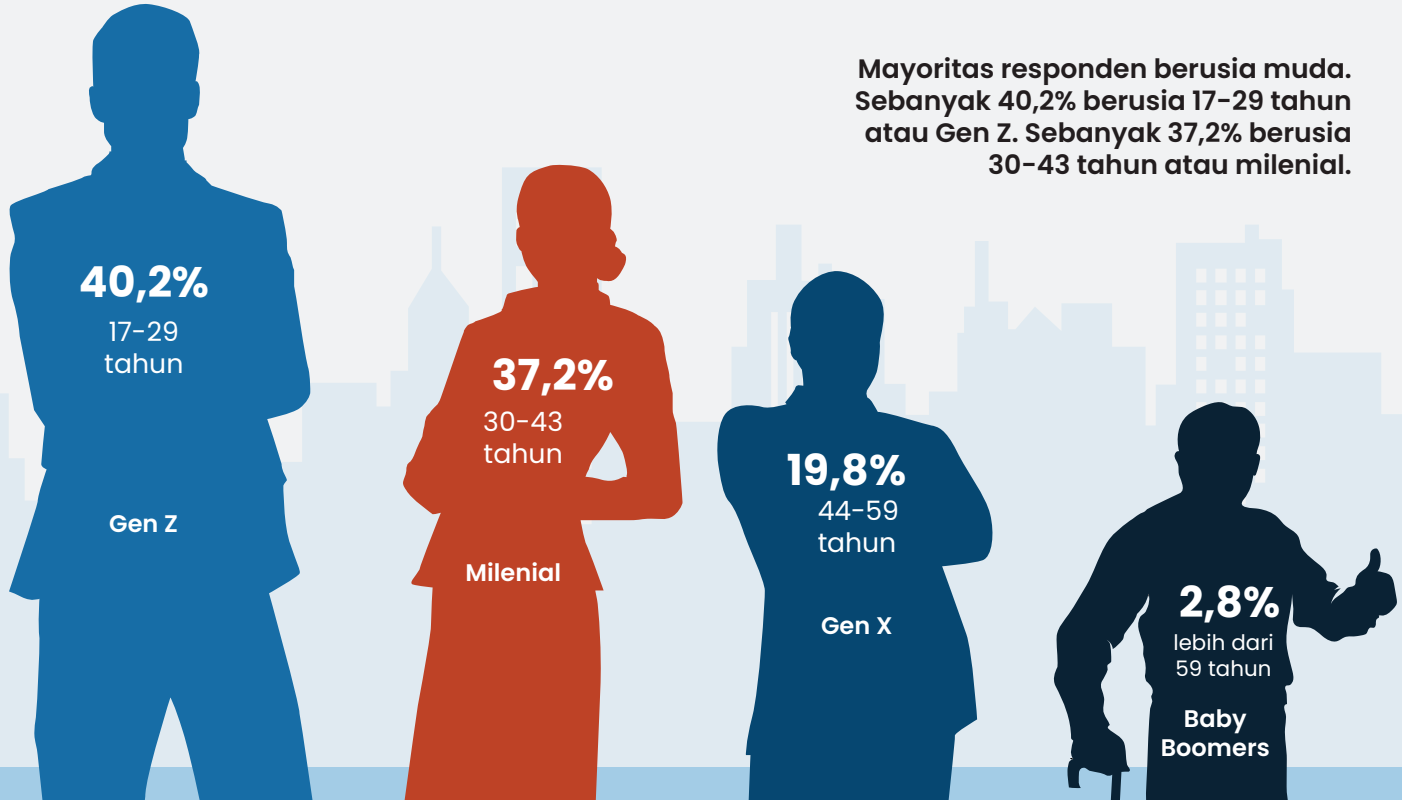
Pengisian survei didominasi oleh responden dengan pekerjaan karyawan swasta (51,4%).



Umur

(pada 14 Februari 2024 nanti)

Mayoritas responden berusia muda. Sebanyak 40,2% berusia 17–29 tahun atau Gen Z. Sebanyak 37,2% berusia 30–43 tahun atau milenial.



Jenis Kelamin

Lebih banyak laki-laki yang berperan serta dalam survei ini. Sebanyak 58,2% peserta survei adalah laki-laki. Sisanya, 41,8% adalah perempuan.

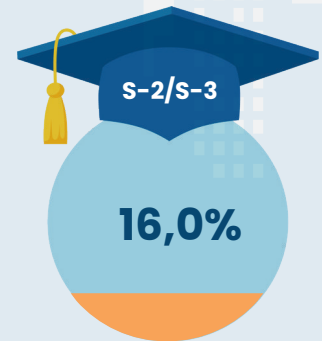
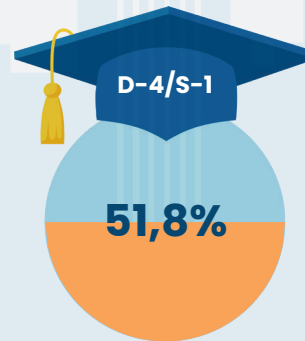
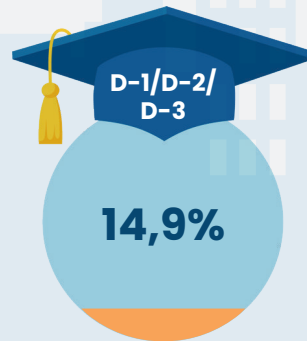
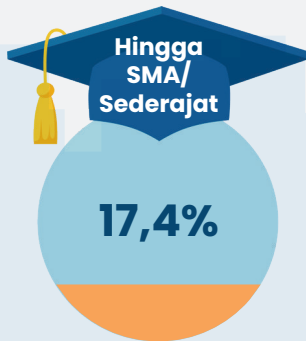
41,8%
Perempuan



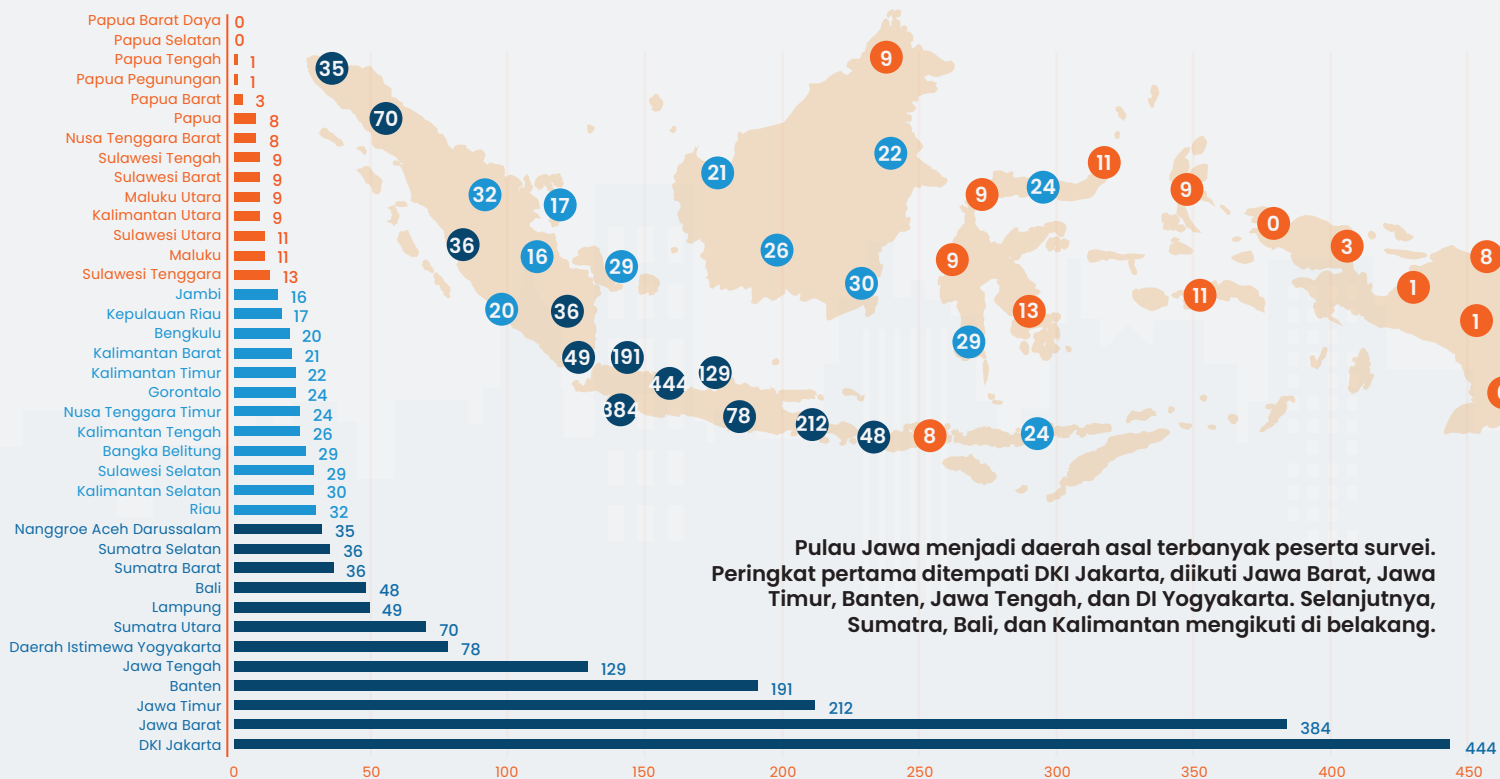
58,2%
Laki-laki

Pendidikan Terakhir

Jenjang D-4/S-1 mendominasi latar belakang pendidikan peserta survei, yakni sebanyak 51,8%. Sisanya, terbagi relatif rata untuk pendidikan SMA/ sederajat, D-1/D-2/D-3, serta S-2/S-3.



Domisili



NPWP

Sebagian besar peserta survei memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni sebanyak 84,9%.



84,9%

Ada/Sudah Punya



15,1%

Tidak Ada/Belum Punya

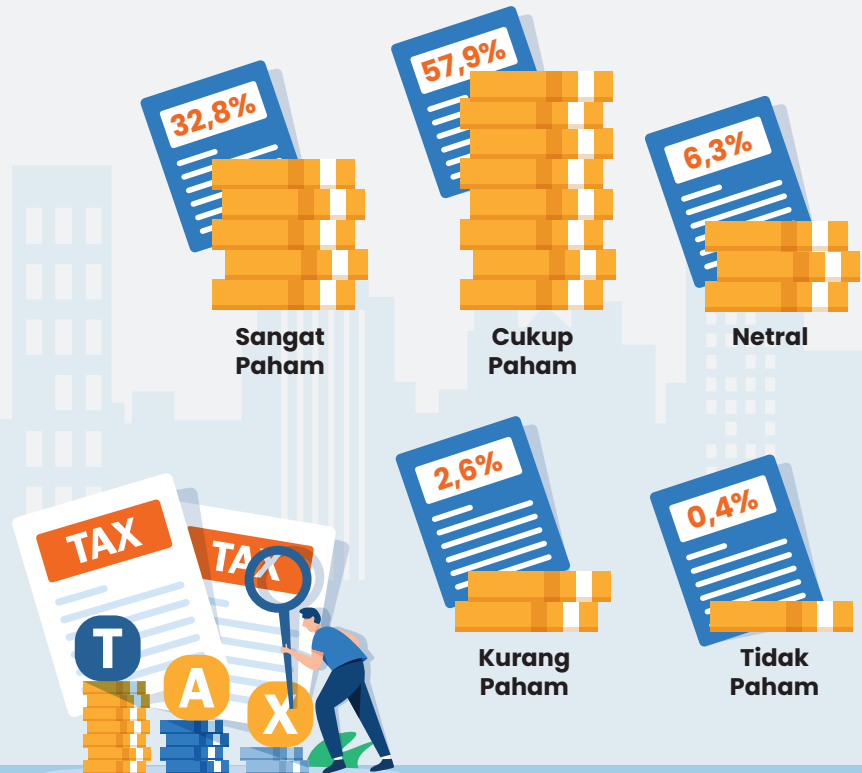


Pemahaman Soal Pajak

Apakah Anda memahami sepenuhnya mengenai **hak dan kewajiban** dari wajib pajak?

Sebanyak 90,7% responden sudah paham-sangat paham terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak.

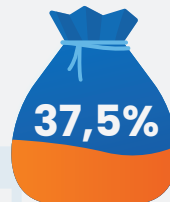
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Paham	31,4%	31,7%	35,7%	46,6%
Cukup Paham	59,0%	59,4%	55,6%	39,7%
Netral	6,9%	5,6%	5,8%	8,6%
Kurang Paham	2,3%	3,0%	2,7%	1,7%
Tidak Paham	0,4%	0,4%	0,2%	3,5%



Apakah Anda mengetahui **penggunaan uang pajak** yang dikumpulkan dari masyarakat wajib pajak?

Sebanyak 87,3% responden menyatakan tahu-sangat tahu tentang penggunaan uang pajak.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Tahu	39,7%	34,5%	37,9%	44,8%
Cukup Tahu	49,0%	51,5%	49,0%	43,1%
Netral	6,0%	7,4%	6,3%	3,5%
Kurang Tahu	4,7%	5,6%	5,1%	6,9%
Tidak Tahu	0,7%	1,0%	1,7%	1,7%



Sangat Tahu



Cukup Tahu



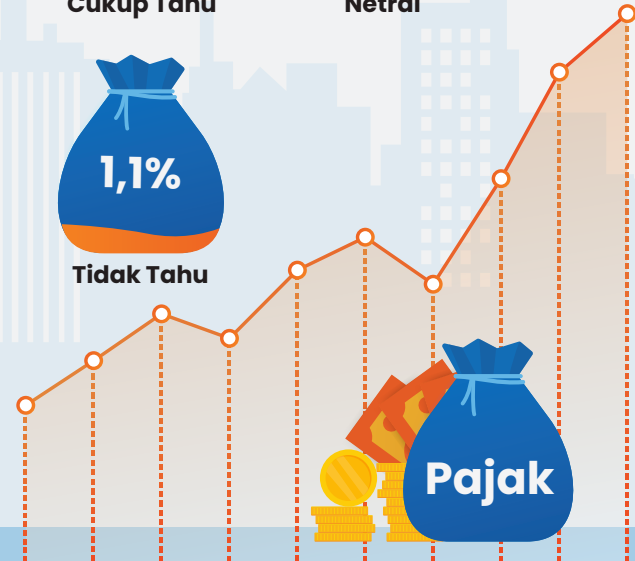
Netral



Kurang Tahu



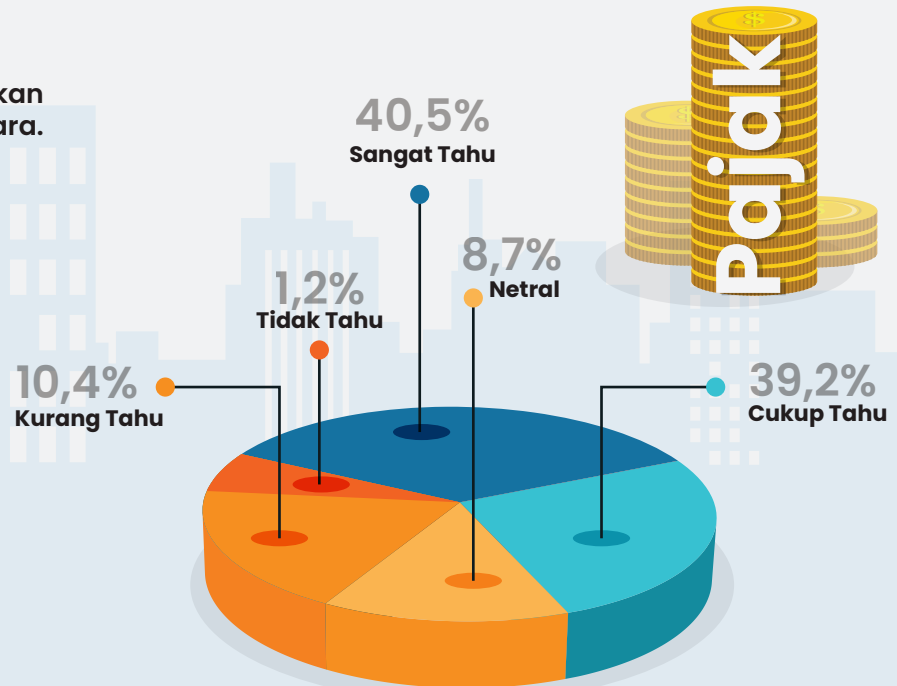
Tidak Tahu



Tahukah Anda **kontribusi pajak** dalam pendapatan negara kurang/lebih sebesar 70%? Dengan kata lain, kontribusinya paling dominan dalam penerimaan perpajakan yang mencapai sekitar 80% dari total pendapatan negara.

Sebanyak 79,7% responden mengaku tahu-sangat tahu bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara.

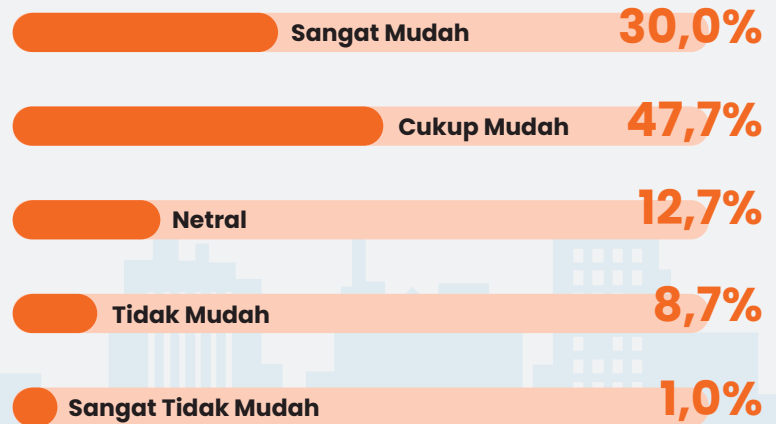
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Tahu	42,2%	38,9%	40,5%	37,9%
Cukup Tahu	37,4%	40,9%	39,8%	39,7%
Netral	9,6%	8,7%	6,1%	13,8%
Kurang Tahu	9,9%	10,4%	12,1%	5,2%
Tidak Tahu	1,0%	1,2%	1,5%	3,5%



Seberapa mudah Anda **memenuhi kewajiban perpajakan**, termasuk pelaporan SPT Tahunan?

Sebagian besar responden menilai pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan, bisa dilakukan dengan mudah. Sebanyak 47,7% responden menilai cukup mudah dan 30,0% menilai sangat mudah.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Mudah	25,6%	33,0%	32,0%	37,9%
Cukup Mudah	46,6%	48,1%	50,5%	37,9%
Netral	16,7%	10,1%	9,7%	12,1%
Tidak Mudah	9,9%	8,2%	6,8%	10,3%
Sangat Tidak Mudah	1,2%	0,7%	1,0%	1,7%



Menurut Anda, seberapa mudah cara **mendapatkan informasi atau referensi mengenai pajak**, termasuk peraturannya?

Sebanyak 78,4% responden mengaku cukup-sangat mudah dalam mengakses informasi atau referensi tentang pajak. Sisanya, 21,6% memilih netral-sangat tidak mudah dalam mengakses informasi pajak.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Mudah	33,6%	34,0%	32,8%	37,9%
Cukup Mudah	43,1%	44,4%	48,3%	44,8%
Netral	16,9%	13,8%	11,2%	10,3%
Tidak Mudah	5,6%	6,9%	6,6%	5,2%
Sangat Tidak Mudah	0,8%	0,9%	1,2%	1,7%



Sangat Mudah

33,7%

Cukup Mudah

44,7%

Netral

14,4%

Tidak Mudah

6,3%

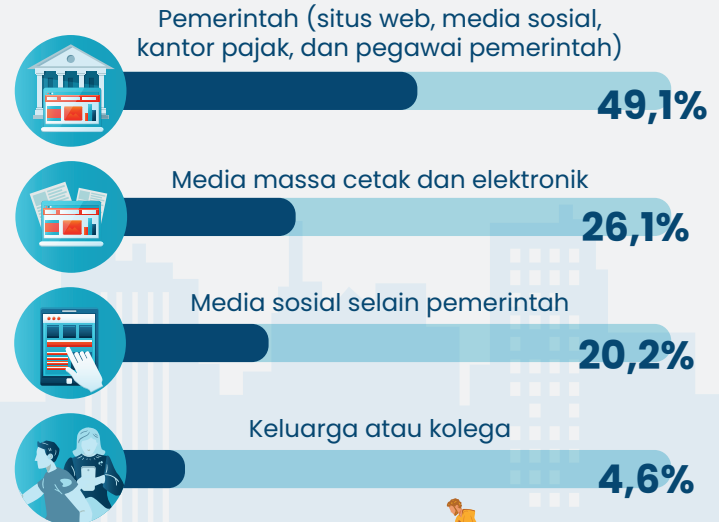
Sangat Tidak Mudah

1,0%

Sumber apa yang menjadi **andalan Anda untuk mendapatkan informasi pajak** selama ini?

Nyaris separuh responden, sebanyak 49,1%, menggunakan sumber-sumber resmi pemerintah (laman resmi, medsos, pernyataan resmi) untuk mendapatkan informasi pajak.

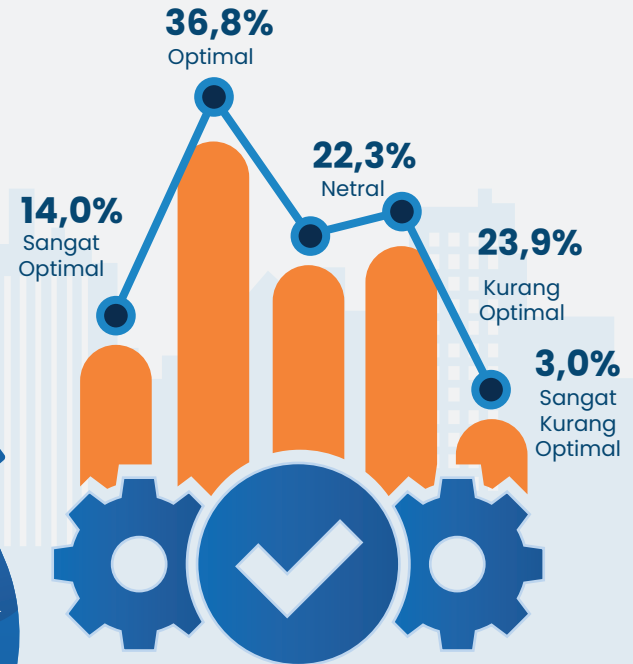
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Pemerintah (situs web, media sosial, kantor pajak, dan pegawai pemerintah)	47,2%	48,0%	55,1%	50,0%
Media massa cetak dan elektronik	24,9%	26,8%	26,0%	34,5%
Media sosial selain pemerintah	22,5%	21,5%	15,5%	5,2%
Keluarga atau kolega	5,5%	3,8%	3,4%	10,3%



Menurut Anda, seberapa optimal **beban pajak** sudah **dibagi sesuai dengan kemampuan masyarakat** (asas gotong royong)?

Suara responden terpecah dalam menilai beban pajak yang terbagi kepada masyarakat. Sebanyak 50,8% menilai beban pajak sudah optimal terbagi. Lalu, sebanyak 22,3% memilih netral.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Optimal	14,9%	13,6%	11,9%	20,7%
Optimal	41,1%	34,5%	35,0%	19,0%
Netral	21,3%	22,8%	22,1%	31,0%
Kurang Optimal	21,3%	24,8%	26,9%	27,6%
Sangat Kurang Optimal	1,4%	4,3%	4,1%	1,7%



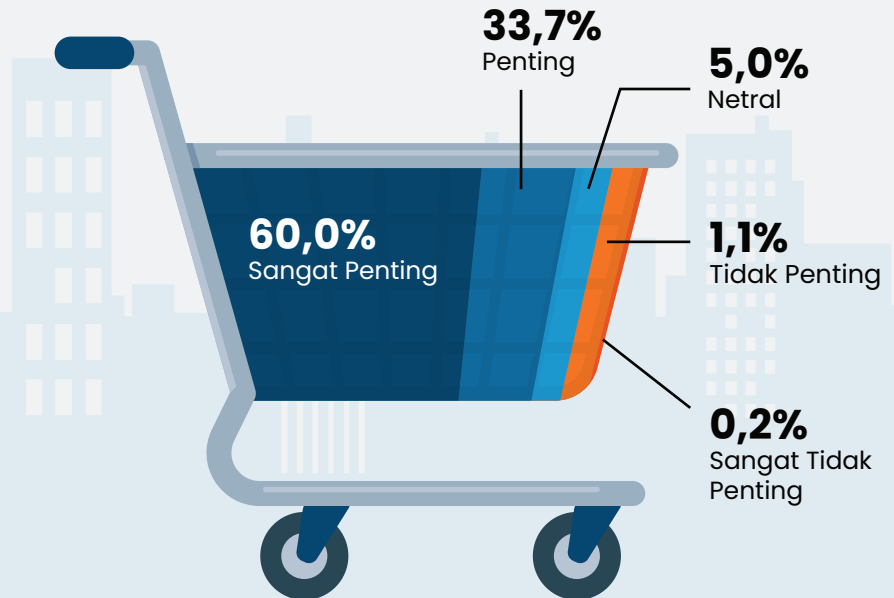


Perpajakan Harus Dibicarakan dalam Pemilu

Menurut Anda, seberapa penting **agenda pembangunan (belanja)** disampaikan parpol/capres dalam masa kampanye pemilu?

Sebanyak 93,7% responden menyatakan agenda belanja pemerintah penting-sangat penting untuk disampaikan oleh parpol/capres dalam masa kampanye pemilu.

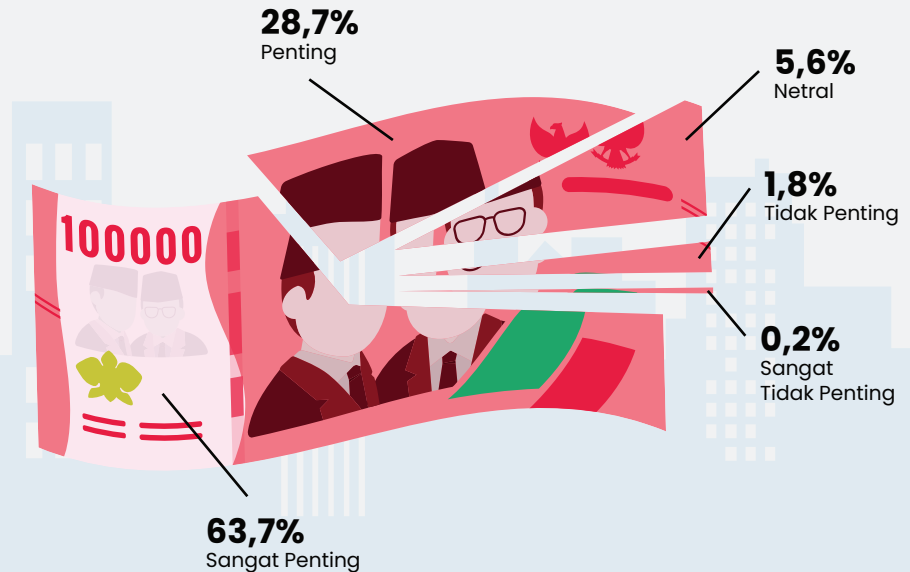
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Penting	55,2%	59,4%	70,2%	67,2%
Penting	37,8%	34,5%	24,8%	25,9%
Netral	5,9%	4,8%	3,6%	5,2%
Tidak Penting	0,8%	1,2%	1,2%	1,7%
Sangat Tidak Penting	0,4%	0,1%	0,2%	0,0%



Menurut Anda, seberapa penting **agenda cara membiayai belanja** disampaikan parpol/capres dalam masa kampanye pemilu?

Sebanyak 92,4% responden menilai agenda pembiayaan program pemerintah sangat penting-penting disampaikan oleh parpol/capres dalam masa kampanye.

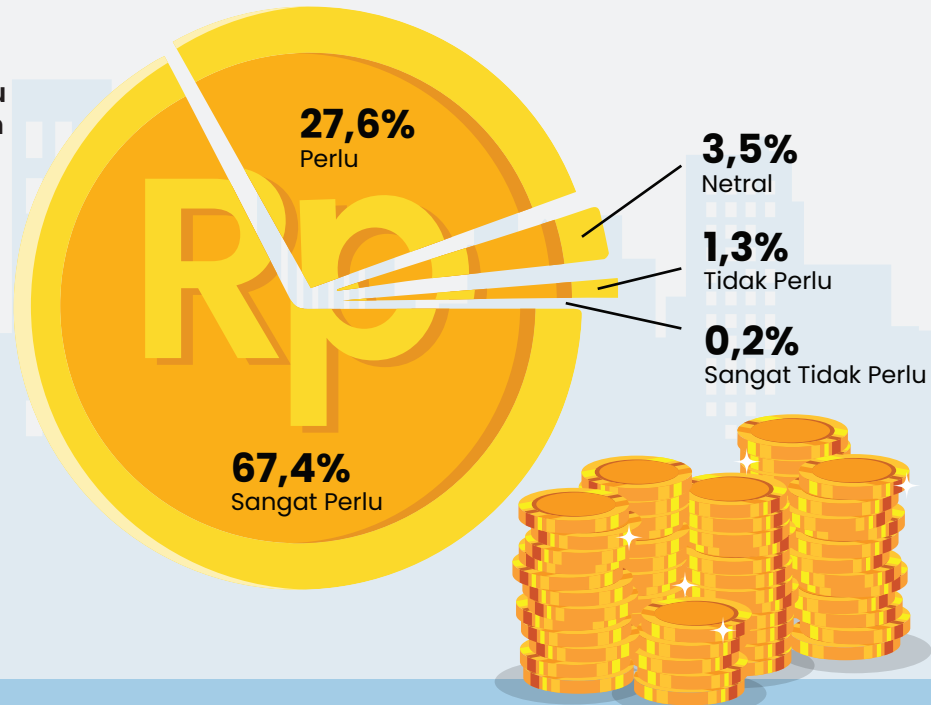
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Penting	60,0%	63,1%	71,6%	70,7%
Penting	31,7%	29,5%	21,8%	24,1%
Netral	6,0%	6,1%	4,1%	3,5%
Tidak Penting	2,3%	1,3%	1,9%	0,0%
Sangat Tidak Penting	0,1%	0,0%	0,5%	1,7%



Mengingat mayoritas pembiayaan atau pendanaan (pendapatan negara) berasal dari perpajakan, apakah parpol/capres perlu menyampaikan agenda atau kebijakan perpajakannya?

Sebanyak 95,0% responden sepakat kalau parpol/capres perlu-sangat perlu menyampaikan agenda atau kebijakan perpajakannya selama kampanye pemilu.

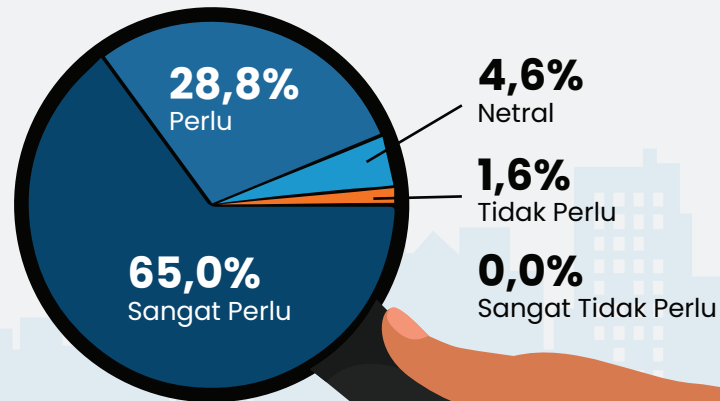
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	63,8%	67,9%	73,1%	72,4%
Perlu	29,3%	27,4%	23,5%	25,9%
Netral	4,5%	3,1%	2,4%	0,0%
Tidak Perlu	1,7%	1,3%	1,0%	0,0%
Sangat Tidak Perlu	0,1%	0,3%	0,0%	1,7%



Menurut Anda, pada **debat capres/cawapres**, apakah perlu mengangkat secara khusus **topik mengenai cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan**, untuk mendanai agenda pembangunan?

Sebanyak 93,8% responden setuju agar debat capres-cawapres nanti mengungkap topik tentang pajak. Secara terperinci, sebanyak 65,0% responden menilai sangat perlu agar isu pajak muncul dalam debat. Sementara 28,8% menilai perlu.

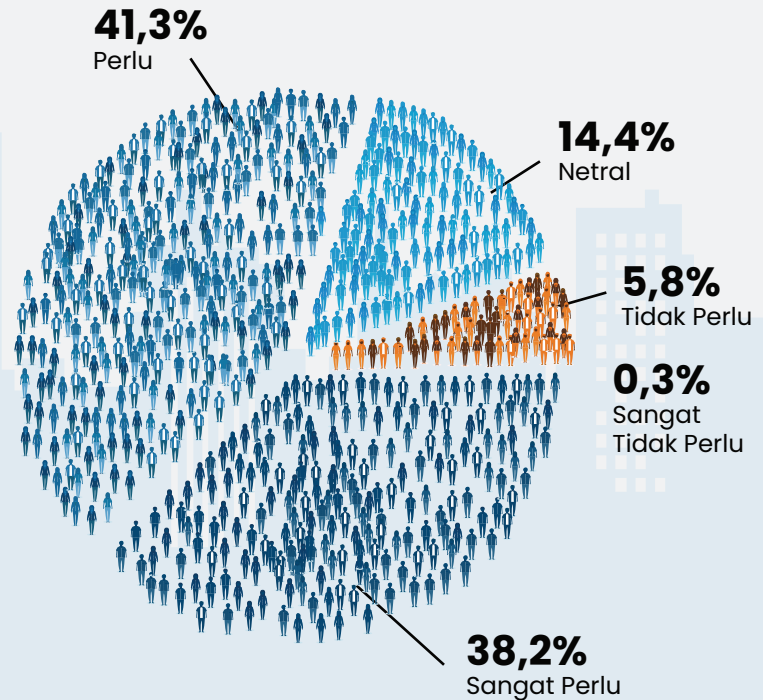
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	59,4%	66,9%	72,3%	67,2%
Perlu	32,6%	27,4%	24,3%	24,1%
Netral	6,1%	3,8%	2,9%	6,9%
Tidak Perlu	1,9%	1,9%	0,5%	1,7%
Sangat Tidak Perlu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Perlukah **wajib pajak dilibatkan** dalam penyusunan agenda atau kebijakan pajak parpol/capres ?

Mayoritas responden memandang perlunya wajib pajak dilibatkan dalam penyusunan agenda pajak oleh parpol/capres. Sebanyak 38,2% responden menilai sangat perlu dan sebanyak 41,3% responden menilai perlu.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	36,1%	39,6%	40,8%	32,8%
Perlu	46,1%	39,5%	35,4%	36,2%
Netral	13,0%	14,4%	16,0%	22,4%
Tidak Perlu	4,7%	6,1%	7,5%	6,9%
Sangat Tidak Perlu	0,1%	0,5%	0,2%	1,7%



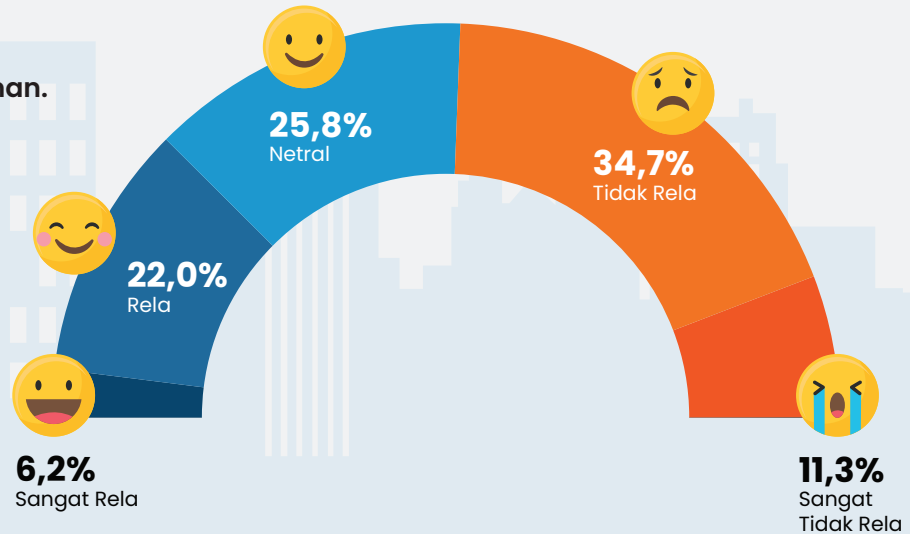


Kerelaan Membayar Pajak

Tax ratio Indonesia masih rendah. Untuk mendanai pembangunan, termasuk agenda yang disampaikan parpol/capres, apakah Anda **rela membayar pajak lebih besar** dari yang dibayarkan atas dasar peraturan yang berlaku saat ini?

Sebanyak 46,0% responden tidak rela-sangat tidak rela membayar pajak lebih besar untuk mendanai pembangunan. Lalu, sebanyak 25,8% responden menyatakan netral.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Reli	5,6%	7,5%	5,1%	5,2%
Reli	23,4%	21,2%	20,2%	25,9%
Netral	26,4%	22,4%	28,4%	43,1%
Tidak Reli	34,1%	36,7%	34,2%	19,0%
Sangat Tidak Reli	10,5%	12,2%	12,1%	6,9%



Jika tidak rela/sangat tidak rela membayar pajak lebih besar, apa **sumber pendapatan negara yang perlu ditingkatkan?**

Sebanyak 43,4% responden menilai PNBP (sumber daya alam) merupakan pendapatan yang perlu ditingkatkan.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
PNBP (sumber daya alam)	42,4%	38,0%	55,0%	44,4%
Dividen BUMN	26,1%	31,5%	25,7%	38,9%
Cukai	15,8%	13,4%	8,9%	7,4%
Bea	12,4%	13,4%	8,7%	9,3%
Utang	3,4%	3,6%	1,7%	0,0%

28,4%
Dividen BUMN

43,4%
PNBP (sumber daya alam)

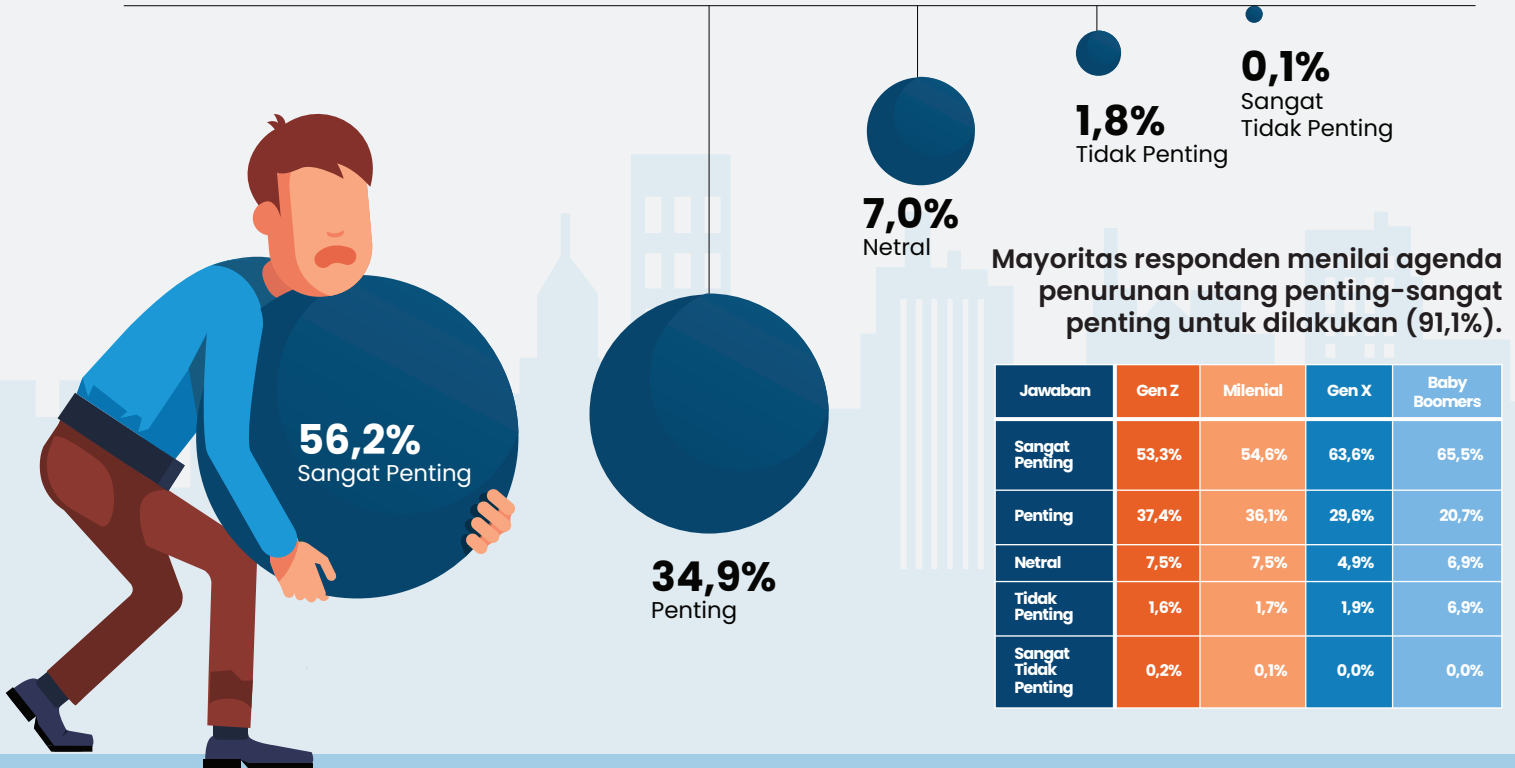
11,9%
Bea

13,2%
Cukai

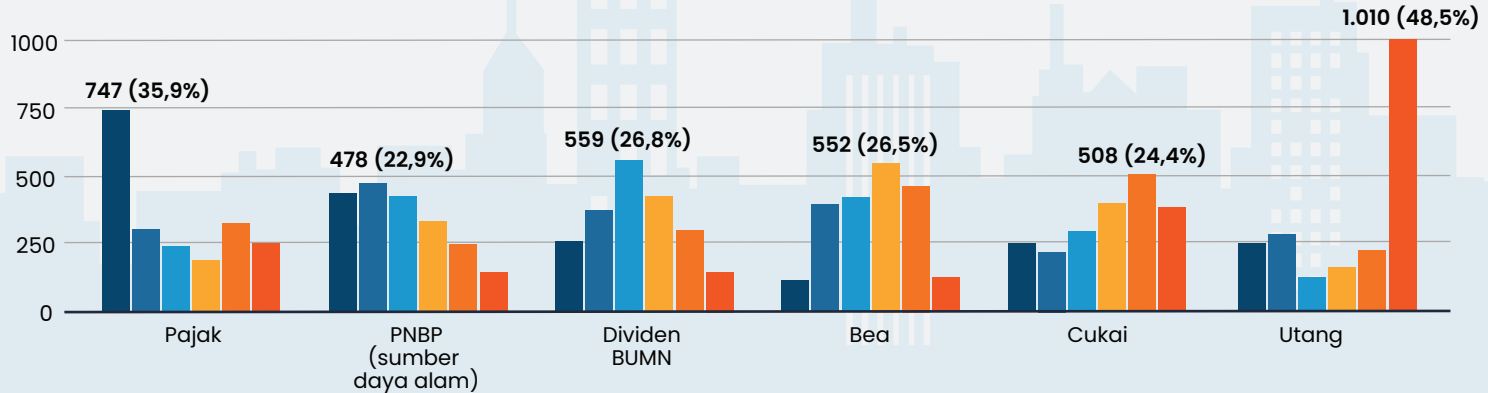
3,0%
Utang



Menurut Anda, seberapa penting parpol/capres harus mempunyai agenda **menurunkan nilai utang negara**?



Seperti apa urutan **prioritas peningkatan sumber pendapatan negara** untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pada masa mendatang?



Penerimaan pajak menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan.
Utang berada pada urutan terakhir.

Prioritas 1: Pajak

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
1	33,5%	35,6%	37,4%	65,5%
5	15,3%	15,1%	18,2%	8,6%
2	16,5%	15,3%	13,6%	8,6%
6	13,3%	11,8%	11,9%	5,2%
3	13,3%	10,7%	11,4%	6,9%
4	8,2%	11,5%	7,5%	5,2%

Prioritas 2: PNPB (Sumber Daya Alam)

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
2	20,8%	22,6%	25,7%	39,7%
1	19,7%	20,1%	26,5%	19,0%
3	21,5%	21,6%	16,3%	20,7%
4	17,9%	15,7%	15,1%	10,3%
5	11,1%	15,0%	9,0%	6,9%
6	9,0%	5,1%	7,5%	3,5%

Prioritas 3: Dividen BUMN

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
3	25,0%	26,9%	28,4%	43,1%
4	22,8%	20,7%	15,5%	22,4%
2	14,5%	19,8%	21,8%	19,0%
5	15,7%	13,5%	15,8%	3,5%
1	12,8%	12,9%	12,6%	6,9%
6	9,3%	6,2%	5,8%	5,2%

Prioritas 4: Bea

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
4	24,1%	25,9%	29,6%	48,3%
5	23,8%	22,3%	19,4%	19,0%
3	18,3%	20,3%	24,8%	13,8%
2	21,2%	18,6%	16,8%	12,1%
6	7,3%	6,2%	3,9%	6,9%
1	5,4%	6,7%	5,6%	0,0%

Prioritas 5: Cukai

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
5	22,0%	23,7%	26,9%	51,7%
4	17,2%	19,8%	24,0%	10,3%
6	21,2%	19,0%	13,6%	12,1%
3	14,1%	15,7%	13,4%	10,3%
1	14,5%	12,0%	9,5%	5,2%
2	11,1%	9,8%	12,6%	10,3%

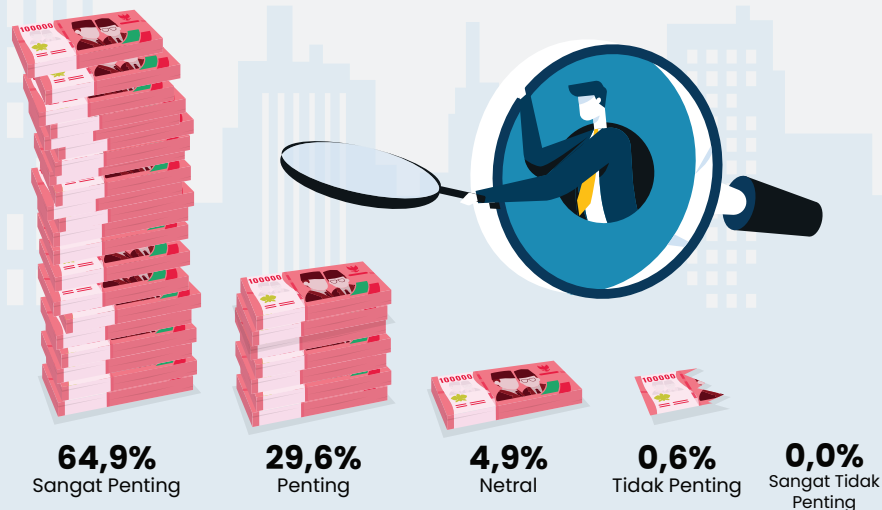
Prioritas 6: Utang

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
6	40,0%	51,8%	57,3%	67,2%
2	16,0%	13,8%	9,5%	10,3%
1	14,2%	12,7%	8,5%	3,5%
5	12,2%	10,5%	10,7%	10,3%
4	9,7%	6,5%	8,3%	3,5%
3	7,9%	4,8%	5,8%	5,2%

Seberapa penting **transparansi penggunaan uang pajak** akan **memengaruhi kerelaan** Anda membayar pajak?

Transparansi penggunaan uang pajak penting-sangat penting memengaruhi kerelaan mayoritas responden dalam membayar pajak (94,5%).

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Penting	59,4%	64,0%	76,5%	72,4%
Penting	33,0%	31,3%	20,6%	22,4%
Netral	6,8%	4,3%	2,2%	5,2%
Tidak Penting	0,8%	0,3%	0,7%	0,0%
Sangat Tidak Penting	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%



Apakah **peningkatan layanan publik** akan **memengaruhi kerelaan** Anda membayar pajak?

65,0 %



Sangat
Memengaruhi

27,9 %



Memengaruhi

5,1 %



Netral

1,9 %



Tidak
Memengaruhi

0,1 %



Sangat Tidak
Memengaruhi

**Peningkatan layanan publik
memengaruhi kerelaan mayoritas
responden membayar pajak (92,9%).**

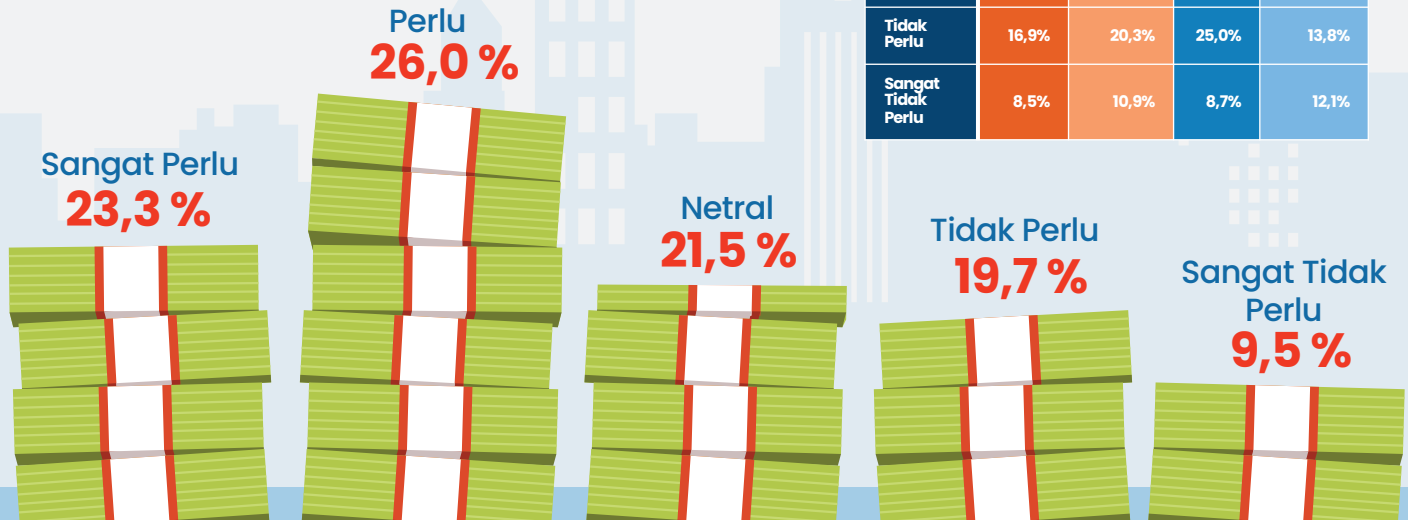
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Memengaruhi	59,6%	67,3%	72,1%	60,3%
Memengaruhi	31,2%	26,7%	23,1%	32,8%
Netral	6,6%	4,0%	4,1%	5,2%
Tidak Memengaruhi	2,4%	1,9%	0,7%	1,7%
Sangat Tidak Memengaruhi	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%



Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio, apakah parpol/capres perlu mempunyai **agenda kenaikan tarif pajak (jenis apapun)?**

Sebanyak 49,3% responden memandang perlu-sangat perlu adanya agenda kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan tax ratio.

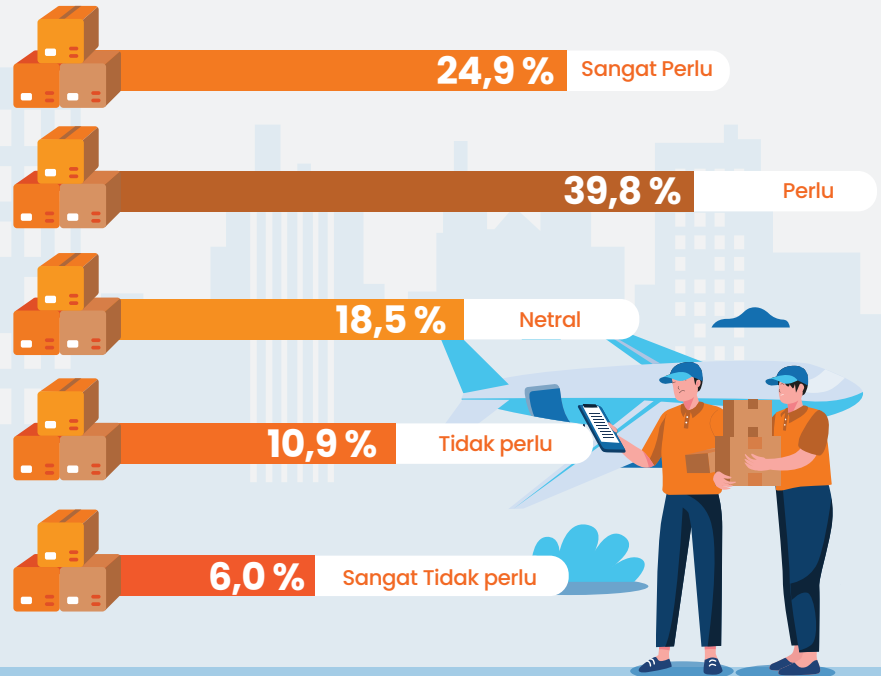
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	22,3%	24,8%	22,6%	20,7%
Perlu	27,2%	26,0%	22,8%	31,0%
Netral	25,1%	18,0%	20,9%	22,4%
Tidak Perlu	16,9%	20,3%	25,0%	13,8%
Sangat Tidak Perlu	8,5%	10,9%	8,7%	12,1%



Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio, apakah parpol/capres perlu mempunyai **agenda penambahan objek kena pajak/cukai/bea yang baru?**

Mayoritas responden memandang perlu-sangat perlu objek pajak/cukai/bea baru untuk meningkatkan tax ratio (64,7%).

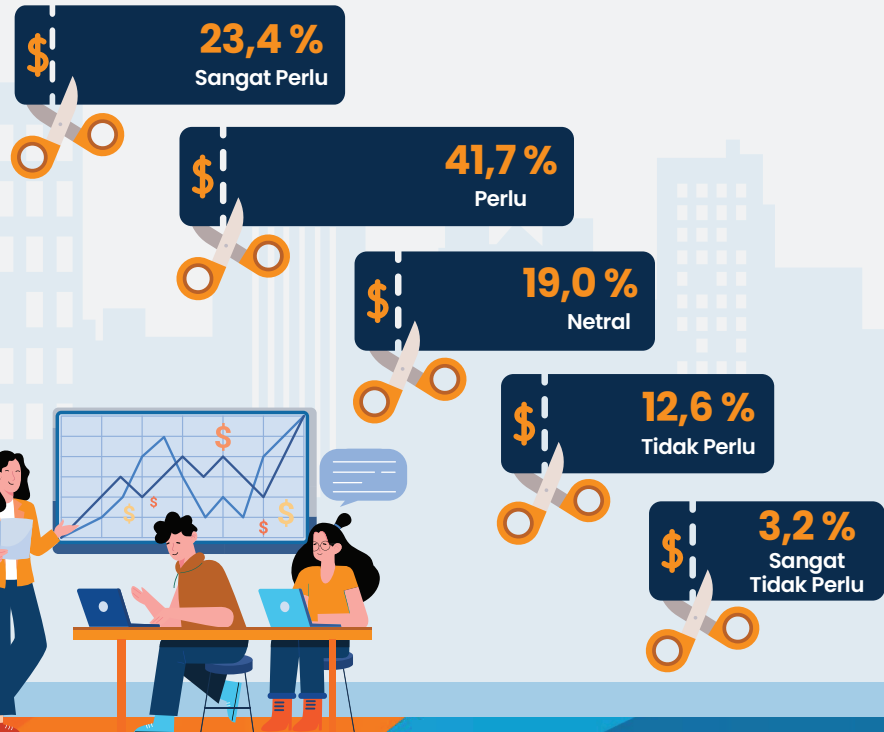
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	23,7%	26,4%	24,3%	27,6%
Perlu	43,9%	36,5%	38,6%	32,8%
Netral	19,6%	18,4%	16,3%	19,0%
Tidak Perlu	7,8%	12,0%	14,3%	15,5%
Sangat Tidak Perlu	5,1%	6,7%	6,6%	5,2%



Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio, apakah parpol/capres perlu mempunyai **agenda penurunan atau pengurangan insentif pajak (jenis apapun)?**

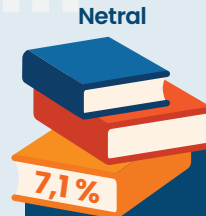
Mayoritas responden menilai perlu-sangat perlu adanya agenda pengurangan insentif untuk meningkatkan tax ratio (65,1%).

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	21,3%	25,6%	24,5%	17,2%
Perlu	44,7%	38,9%	41,5%	37,9%
Netral	17,8%	19,2%	19,7%	31,0%
Tidak Perlu	13,0%	12,2%	12,4%	13,8%
Sangat Tidak Perlu	3,2%	4,1%	1,9%	0,0%



Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio, apakah parpol/capres perlu mempunyai **agenda peningkatan kepatuhan sukarela (misalnya terkait dengan edukasi, pelayanan, kemudahan administrasi, dan sebagainya)**?

Mayoritas responden memandang perlu-sangat perlu ada agenda peningkatan kepatuhan sukarela guna mengerek tax ratio (91,1%).

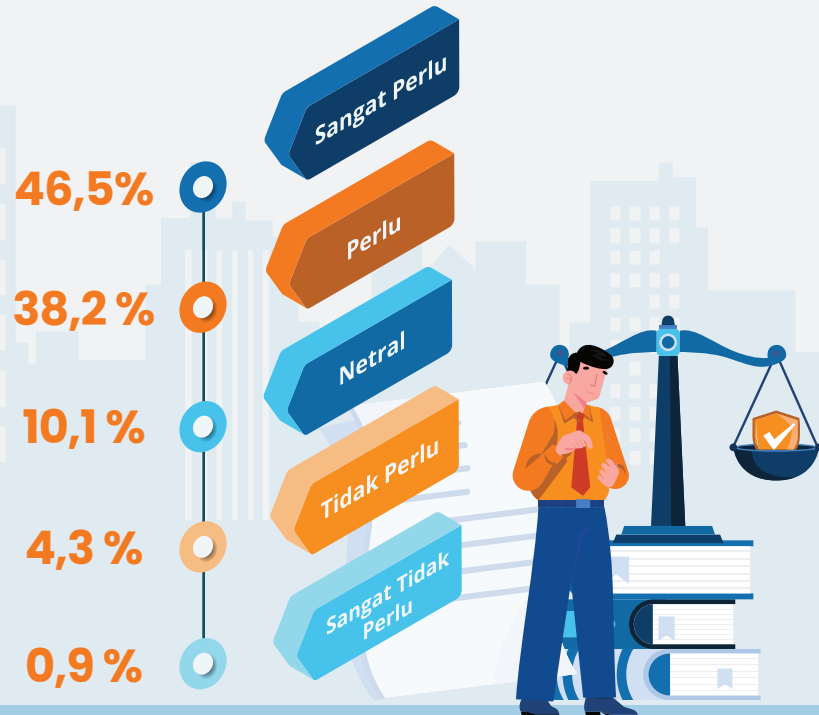


Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	55,8%	51,4%	57,3%	56,9%
Perlu	35,2%	38,8%	36,4%	25,9%
Netral	6,8%	8,3%	5,3%	8,6%
Tidak Perlu	1,9%	1,3%	1,0%	8,6%
Sangat Tidak Perlu	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%

Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio, apakah parpol/capres perlu mempunyai **agenda pemeriksaan hingga penegakan hukum pajak yang lebih ketat?**

Mayoritas responden memandang perlu-sangat perlu agenda pemeriksaan hingga penegakan hukum pajak yang lebih ketat (84,7%).

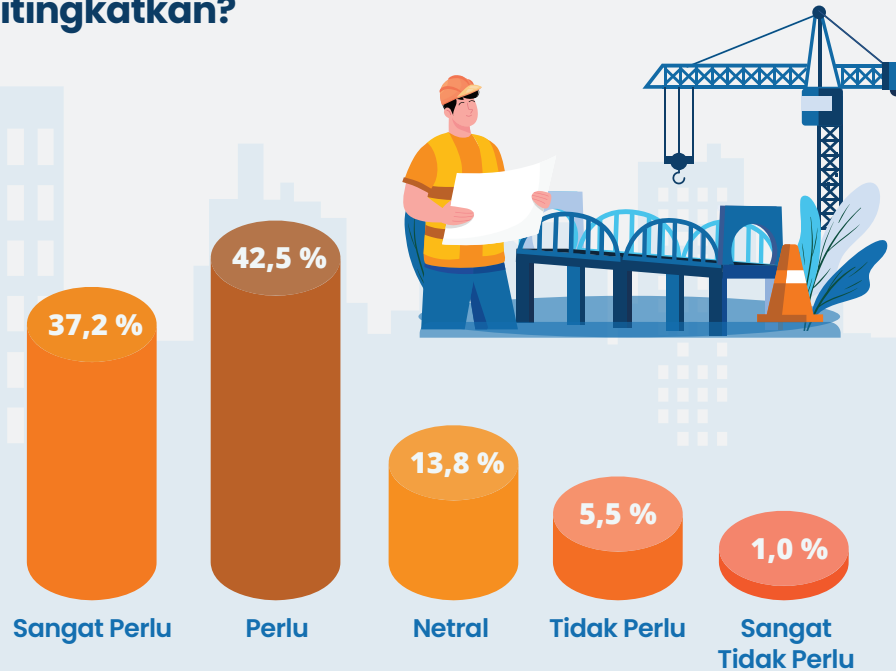
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	46,7%	48,0%	43,7%	43,1%
Perlu	41,1%	35,8%	37,6%	31,0%
Netral	8,7%	9,7%	12,6%	19,0%
Tidak Perlu	2,8%	5,6%	4,9%	6,9%
Sangat Tidak Perlu	0,7%	0,9%	1,2%	0,0%



Terdapat beberapa **sektor usaha yang kontribusinya relatif lebih kecil** (dengan gap cukup lebar) terhadap porsinya dalam perekonomian (undertaxed). Sektor usaha itu seperti konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Apakah penerimaan pajak dari sektor-sektor ini **perlu ditingkatkan?**

Mayoritas responden menilai penerimaan pajak atas sektor usaha yang undertaxed perlu-sangat perlu dipacu lagi (79,7%).

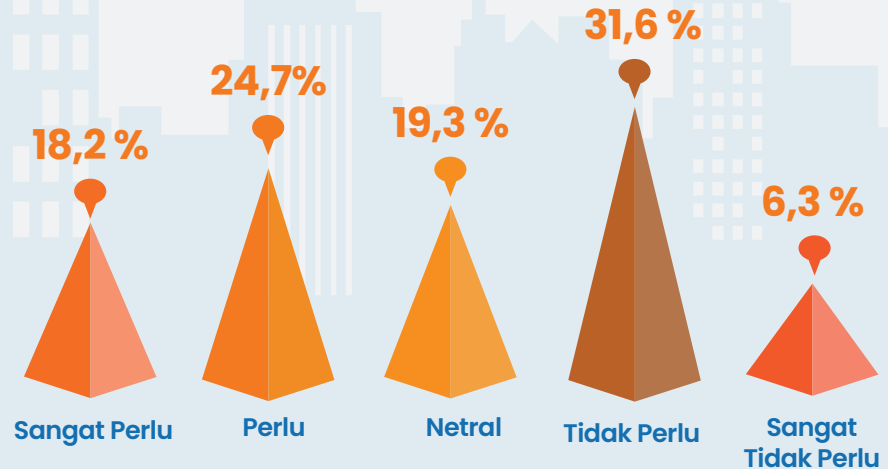
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	34,4%	38,7%	40,5%	34,5%
Perlu	44,4%	41,9%	39,8%	41,4%
Netral	15,3%	12,2%	14,6%	8,6%
Tidak Perlu	5,4%	5,7%	4,6%	10,3%
Sangat Tidak Perlu	0,5%	1,6%	0,5%	5,2%



Terdapat beberapa **sektor usaha yang kontribusi pajaknya relatif lebih besar** (dengan gap cukup lebar) terhadap porsinya dalam perekonomian (overtaxed). Sektor usaha itu seperti manufaktur, perdagangan besar, serta jasa keuangan dan asuransi. Apakah penerimaan pajak dari sektor-sektor ini **perlu dikurangi**?

Sekitar 42,9% responden memandang perlu dikurangnya beban pajak dari sektor usaha yang sudah overtaxed.

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Perlu	18,5%	20,1%	14,8%	12,1%
Perlu	25,2%	25,7%	21,6%	24,1%
Netral	17,3%	18,1%	24,8%	24,1%
Tidak Perlu	32,3%	30,1%	33,3%	29,3%
Sangat Tidak Perlu	6,7%	6,0%	5,6%	10,3%



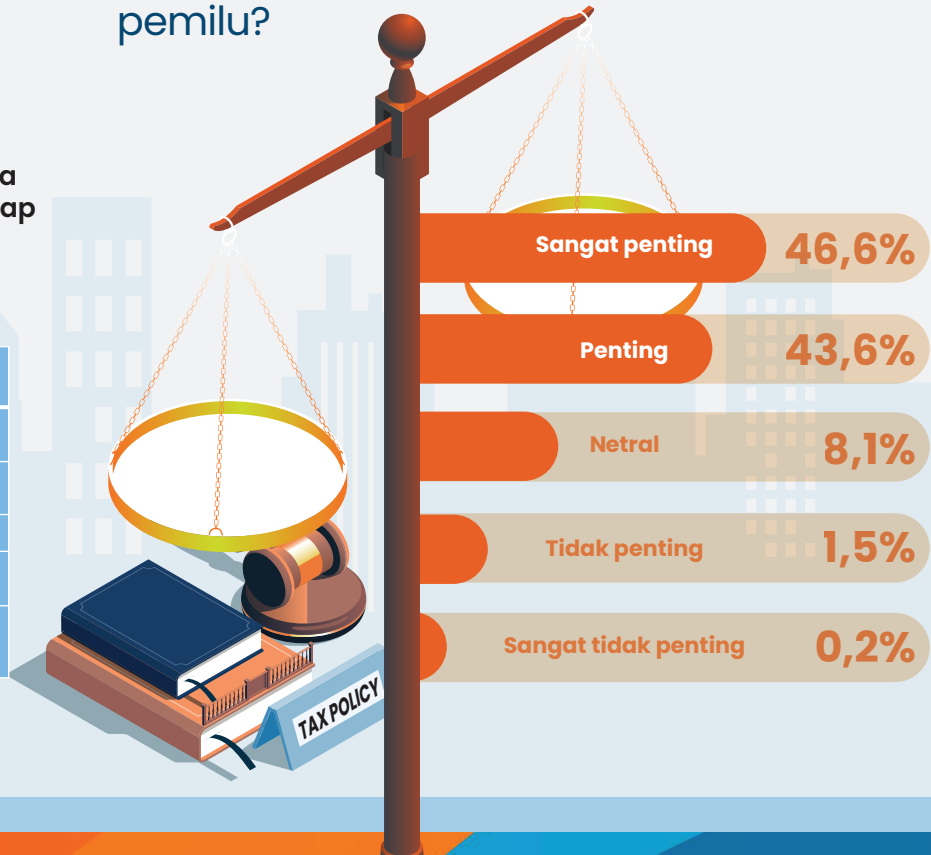


Pajak Memengaruhi Pilihan dalam Pemilu

Seberapa penting **agenda atau kebijakan pajak** dari parpol/capres akan **memengaruhi pilihan** Anda dalam pemilu?

Mayoritas responden menilai agenda pajak punya pengaruh besar terhadap pilihan politik (90,2%).

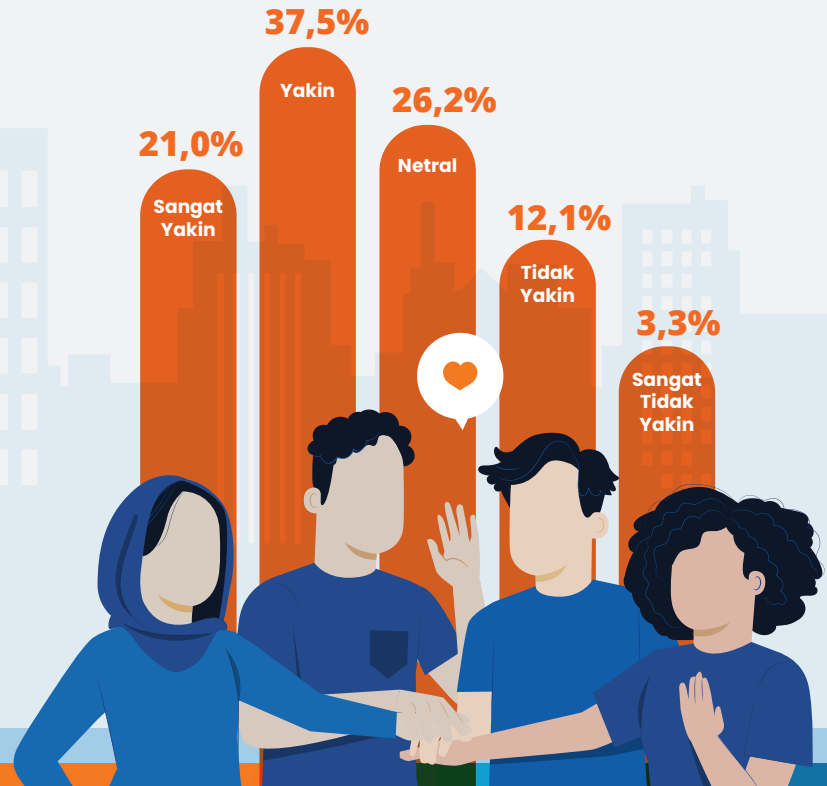
Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Penting	41,8%	48,6%	52,4%	48,3%
Penting	48,3%	41,8%	38,8%	32,8%
Netral	8,1%	8,4%	6,1%	17,2%
Tidak Penting	1,4%	1,0%	2,4%	1,7%
Sangat Tidak Penting	0,4%	0,1%	0,2%	0,0%



Seberapa yakin parpol yang akan Anda pilih **telah memberikan komitmen yang jelas terhadap agenda sektor pajak?**

Mayoritas responden meyakini parpol memiliki komitmen terhadap agenda perpajakan (58,5%).

Jawaban	Gen Z	Milenial	Gen X	Baby Boomers
Sangat Yakin	19,6%	21,6%	20,6%	36,2%
Yakin	39,0%	34,0%	41,3%	36,2%
Netral	28,3%	26,4%	21,8%	22,4%
Tidak Yakin	9,9%	14,1%	13,6%	5,2%
Sangat Tidak Yakin	3,2%	3,9%	2,7%	0,0%





Temuan Menarik dalam Survei

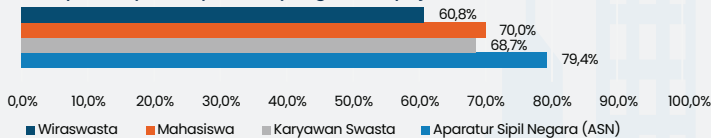
Mayoritas Responden Sudah Melek Pajak

69,5%

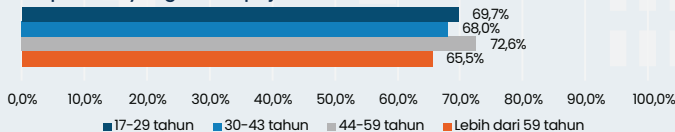
(1.446 dari 2.080 responden)

Mayoritas responden merupakan masyarakat melek pajak. Responden yang masuk dalam kelompok masyarakat melek pajak memenuhi 3 kriteria.

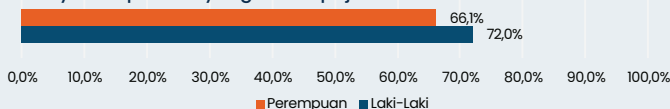
- Ditinjau dari masing-masing kelompok profesi, berapa banyak responden yang melek pajak?



- Berdasarkan pada setiap kelompok generasi, berapa banyak responden yang melek pajak?



- Ditinjau dari masing-masing kelompok gender, berapa banyak responden yang melek pajak?

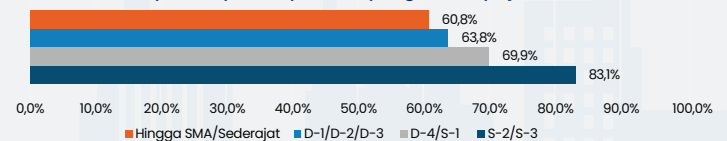


- 1** Sangat paham dan cukup paham sepenuhnya mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak

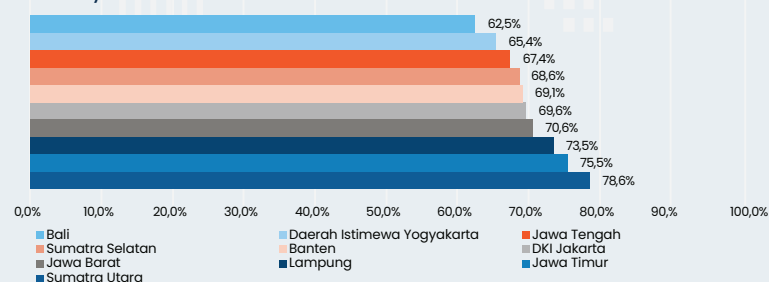
- 2** Sangat tahu dan cukup tahu penggunaan uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat wajib pajak

- 3** Sangat tahu dan cukup tahu kontribusi pajak dalam pendapatan negara kurang/lebih sebesar 70% (paling banyak dibandingkan sumber lainnya)

- Berdasarkan pada masing-masing latar belakang pendidikan terakhir, berapa banyak responden yang melek pajak?



- Responden melek pajak tersebar di 34 dari 36 provinsi asal pengisi survei. Rata-ratanya sebanyak 68,1%. Berikut ini persentase melek pajak dari 10 provinsi dengan responden terbanyak.

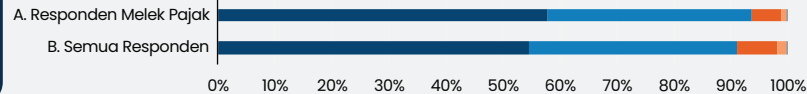


Opsi Kebijakan Perpajakan untuk Tingkatkan Tax Ratio

Terkait dengan upaya peningkatan tax ratio, responden melek pajak memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pandangan seluruh responden dalam survei pajak dan politik DDTCNews ini. Peningkatan kepatuhan sukarela (edukasi, pelayanan, kemudahan administrasi, dan sebagainya) menjadi opsi yang paling banyak dipilih.

1

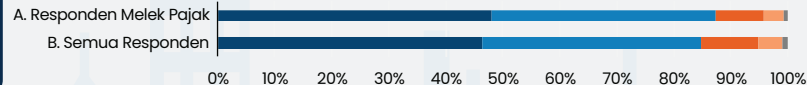
Peningkatan kepatuhan sukarela (edukasi, pelayanan, kemudahan administrasi, dan sebagainya)



Mayoritas sangat perlu dan perlu
A. 93,7%
B. 91,0%

2

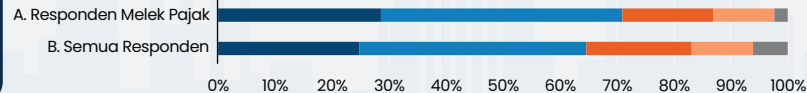
Pengetatan upaya pemeriksaan hingga penegakan hukum pajak



Mayoritas sangat perlu dan perlu
A. 87,4%
B. 84,7%

3

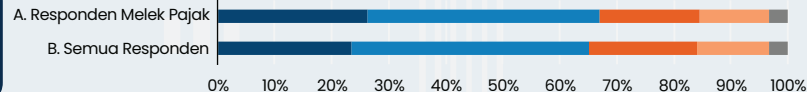
Penambahan objek kena pajak/ cukai/ bea yang baru



Mayoritas sangat perlu dan perlu
A. 71,0%
B. 64,7%

4

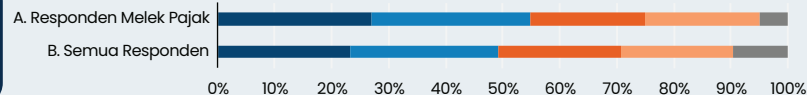
Penurunan atau pengurangan insentif pajak (jenis apapun)



Mayoritas sangat perlu dan perlu
A. 67,0%
B. 65,1%

5

Kenaikan tarif pajak (jenis apapun)



Mayoritas sangat perlu dan perlu
A. 54,8%
B. 49,3%

Capres Perlu Bicara Agenda Perpajakan, Tidak Hanya Belanja

Temuan

Seluruh Responden
(2.080)

89,6%
(1.863 dari 2.080 total responden)

Tidak hanya agenda pembangunan (belanja), cara membiayai belanja tersebut juga penting disampaikan oleh calon presiden

✓ Sangat penting
✓ Penting

Agenda pembangunan (belanja) disampaikan parpol/capres dalam masa kampanye pemilu

✓ Sangat penting
✓ Penting

Agenda cara membiayai belanja disampaikan parpol/capres dalam masa kampanye pemilu

Responden Melek Pajak
(1.446)

93,4%
(1.350 dari 1.446 total responden melek pajak)

96,8%
(1.804 responden)

Dari responden yang menganggap penting penyampaian agenda belanja dan cara membiayai belanja tersebut, mayoritas berpendangan perlunya calon presiden menyampaikan agenda atau kebijakan perpajakan

✓ Sangat penting
✓ Penting

Parpol/capres menyampaikan agenda atau kebijakan perpajakan karena sumber mayoritas pembiayaan atau pendanaan (pendapatan negara)

98,4%
(1.328 responden)

96,0%
(1.732 responden)

Dari responden yang menganggap perlunya calon presiden menyampaikan agenda atau kebijakan perpajakan tersebut, mayoritas juga berpendapat perlu debat khusus topik mengenai cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan

✓ Sangat penting
✓ Penting

Topik pada debat capres/cawapres mengenai cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan atas program pembangunan

96,5%
(1.281 responden)

80,4%
(1.450 responden)

Dari responden yang menganggap perlunya debat khusus perpajakan tersebut, mayoritas berpendapat wajib pajak perlu dilibatkan dalam penyusunan agenda atau kebijakan pajak parpol/capres

✓ Sangat penting
✓ Penting

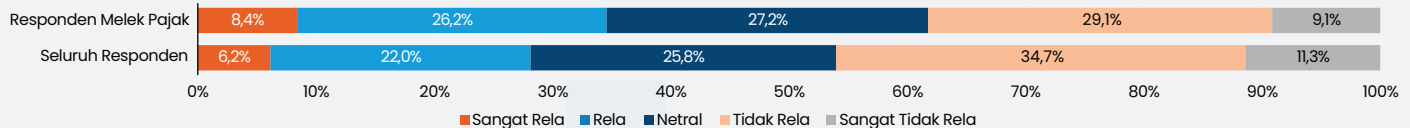
Wajib pajak dilibatkan dalam penyusunan agenda atau kebijakan pajak parpol/capres

83,9%
(1.075 responden)

Kerelaan Responden Bayar Pajak

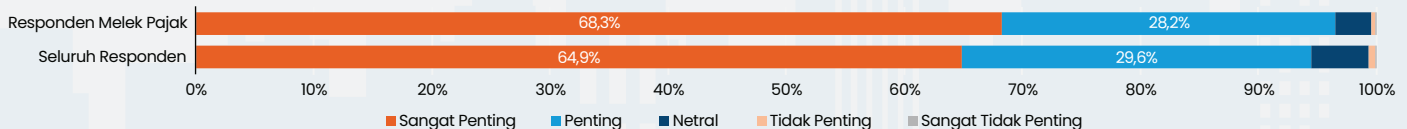
Secara umum, responden cenderung tidak rela jika harus membayar pajak lebih besar untuk mendanai agenda pembangunan yang disampaikan parpol/capres. Namun, khusus untuk responden melek pajak, persentase yang rela tercatat lebih besar ketimbang rata-rata seluruh responden.

Tax ratio Indonesia masih rendah. Untuk mendanai pembangunan, termasuk agenda yang disampaikan parpol/capres, apakah Anda rela membayar pajak lebih besar dari yang dibayarkan atas dasar peraturan yang berlaku saat ini?



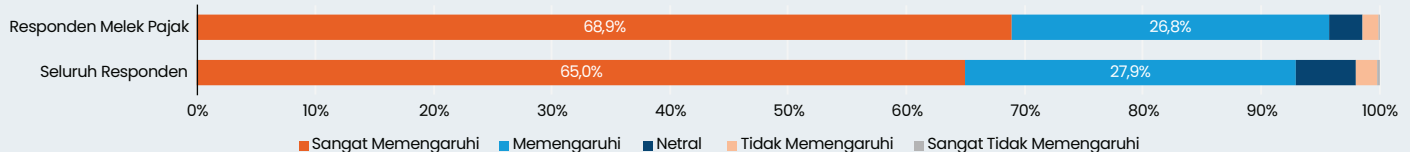
Responden, termasuk masyarakat melek pajak, berpandangan transparansi penggunaan uang pajak akan memengaruhi kerelaan pembayaran pajak.

Seberapa penting transparansi penggunaan uang pajak akan memengaruhi kerelaan Anda membayar pajak?



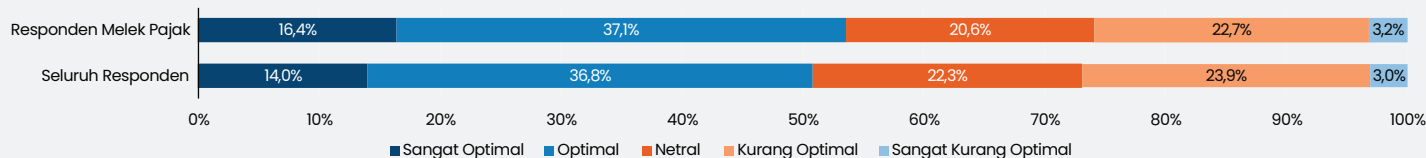
Responden, termasuk masyarakat melek pajak, berpandangan peningkatan layanan publik akan memengaruhi kerelaan membayar pajak.

Apakah peningkatan layanan publik akan memengaruhi kerelaan Anda membayar pajak?

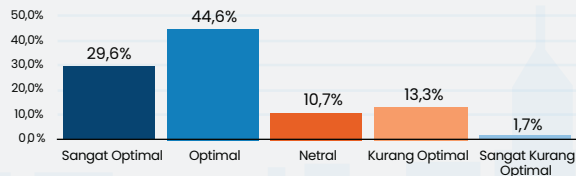


Responden yang rela dan sangat rela membayar pajak lebih besar menganggap beban pajak sudah dibagi sesuai dengan kemampuan. Namun, responden yang netral, tidak rela, dan sangat tidak rela membayar pajak lebih besar cenderung menilai pembagian beban pajak belum optimal.

Menurut Anda, seberapa optimal beban pajak sudah dibagi sesuai dengan kemampuan masyarakat (asas gotong royong)?



Seluruh Responden



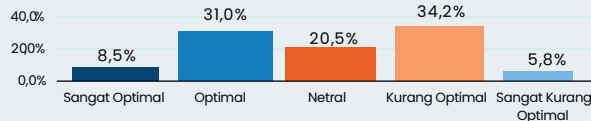
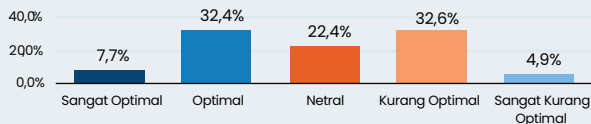
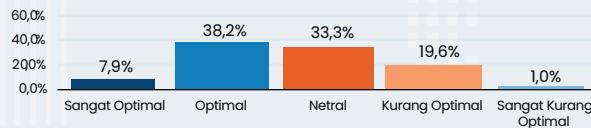
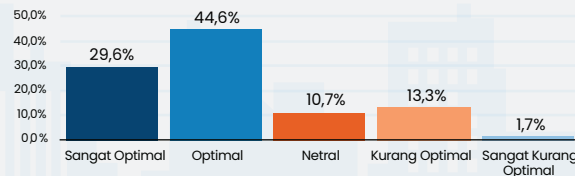
Responden

Sangat Relat dan Relat Bayar Pajak Lebih Besar

Netral Bayar Pajak Lebih Besar

Tidak Relat dan Sangat Tidak Relat Bayar Pajak Lebih Besar

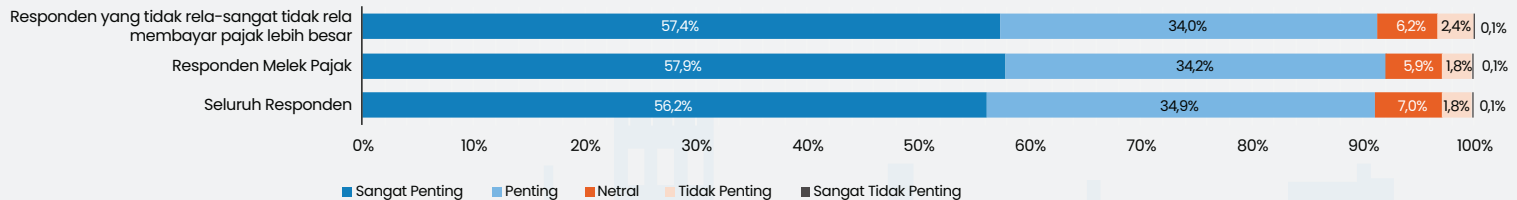
Responden Melek Pajak



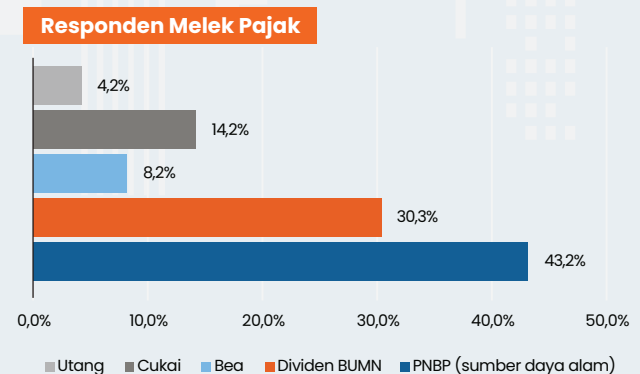
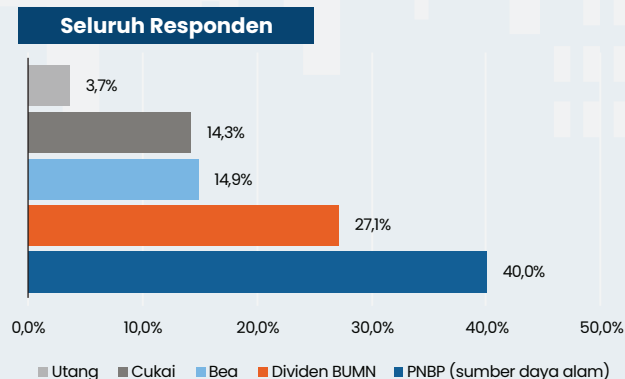
Pajak Prioritas Pertama, Utang Terakhir

Responden, termasuk masyarakat melek pajak, berpandangan pentingnya parpol/capres mempunyai agenda menurunkan nilai utang negara. Mayoritas responden yang tidak rela-sangat tidak rela membayar pajak lebih besar dari yang dibayarkan atas dasar peraturan yang berlaku saat ini juga menganggap penting adanya agenda penurunan nilai utang negara.

Menurut Anda, seberapa penting parpol/capres harus mempunyai agenda menurunkan nilai utang negara?



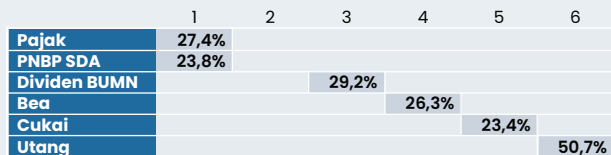
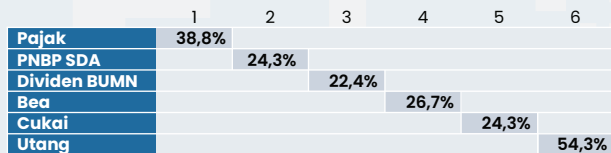
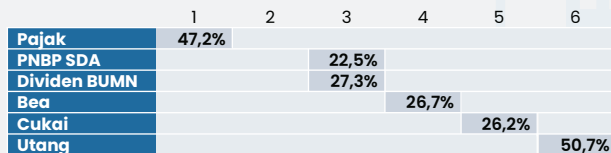
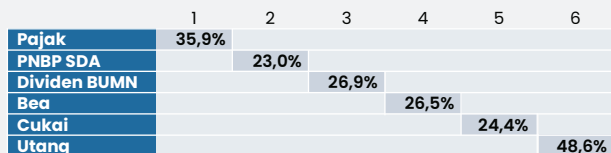
Berikut ini urutan prioritas sumber pendapatan negara yang perlu ditingkatkan ketika responden tidak rela dan sangat tidak rela membayar pajak lebih besar. Prioritas pertama, baik seluruh responden maupun responden melek pajak, adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). Utang menjadi pilihan terakhir.



Namun, ketika pajak masuk pilihan prioritas, mayoritas responden menempatkannya pada pilihan pertama. Utang tetap menjadi pilihan terakhir.

Penempatan ranking merujuk pada kecenderungan mayoritas responden dalam menentukan skala prioritas atas sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan. Misal, atas PNPB SDA, sebanyak 23,0% responden menempatkannya pada pilihan kedua (nomor 2). Angka 23,0% merupakan jumlah terbanyak dibandingkan pilihan pada nomor urut lain.

Seluruh Responden



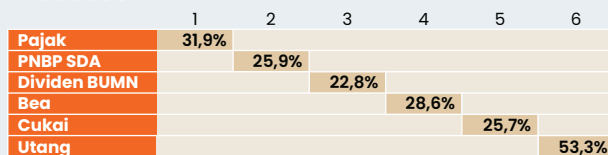
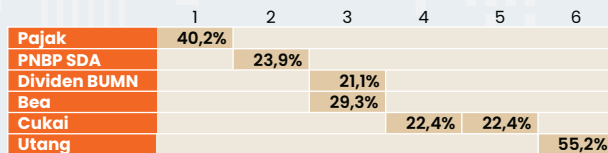
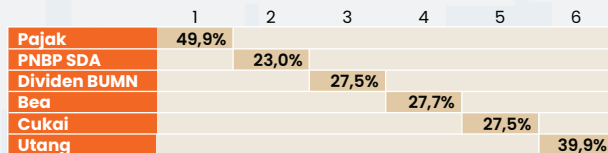
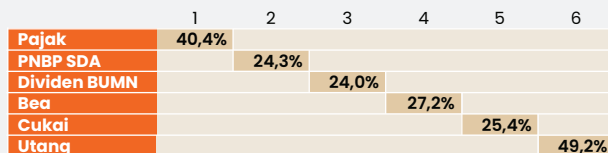
Semua

Sangat Rela dan Rela Bayar Pajak Lebih Besar

Netral Bayar Pajak Lebih Besar

Tidak Rela dan Sangat Tidak Rela Bayar Pajak Lebih Besar

Responden Melek Pajak





Komentar Responden

Apa harapan Anda terkait dengan agenda perpajakan pemerintahan yang akan datang?

Seluruh responden memberikan komentar dan mayoritas menyampaikan harapan yang konstruktif. Redaksi DDTCNews mengelompokkan berbagai jawaban tersebut dalam 12 tematik. Berikut kelompok tematik, disertai dengan contoh jawaban beberapa responden terpilih mengenai agenda perpajakan pemerintahan yang akan datang.

● **Penyederhanaan Regulasi atau Peraturan**

Sebagian responden berharap regulasi atau peraturan terkait dengan perpajakan lebih sederhana dan mudah dipahami. 'Aturan main pajak' diharapkan bisa lebih mudah dengan cara tidak banyak variasi tarif, variasi penghitungan, dan variasi pengklasifikasian.

"Jika aturan pajak di Indonesia mudah dipahami oleh seluruh warga Indonesia, saya yakin tak ada alasan lagi bagi WNI untuk tidak taat pajak. Semua orang akan berbondong-bondong membayar dan melaporkan pajak mereka."

● **Keterlibatan Stakeholders Pajak**

Beberapa responden berharap proses penyusunan regulasi atau peraturan turut melibatkan *stakeholders* terkait untuk menampung semua kepentingan.

"Perlu melibatkan praktisi pajak dalam merumuskan peraturan agar lebih tepat guna mendukung secara serius penerapan *coretax* sehingga meningkatkan *compliance* dan mengurangi *tax audit*."

● **Penguatan Edukasi Pajak**

Pemerintah yang akan datang diharapkan terus memperkuat edukasi pajak kepada masyarakat sejak dini. Edukasi pajak bisa dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan tax center. Praktisi, termasuk konsultan pajak, juga perlu dilibatkan.

"Provide appropriate tax education for the younger generation, because this has a big impact on the goal of Indonesia Maju 2045. Without a strong foundation for the younger generation regarding taxation (lack of information, awareness, critical thinking) it will be very dangerous for the nation's sustainability."

● **Perluasan Basis Pajak**

Beberapa responden berpendapat perlunya perluasan basis pemajakan. Hal ini bisa dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk *artificial intelligence* (AI). Perluasan basis pajak juga akan menciptakan keadilan.

"Harapan saya, perlu ada perluasan basis pemajakan agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan kegiatan *monitoring*/memantau, mencatat, dan mendata wajib pajak secara menyeluruh karena masih banyak wajib pajak yang tidak terdeteksi aktivitas ekonominya."

● **Kejelasan Aturan dengan Ketentuan Teknis**

Sebagian responden berharap ketentuan teknis dari sebuah regulasi dapat memuat detail aturan tanpa multitafsir. Sejumlah responden juga berharap *gap* waktu terbit ketentuan teknis tidak terlalu lama dengan aturan di atasnya (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya).

“Setiap menerbitkan peraturan pajak, mohon agar diberlakukan minimal 2-3 bulan setelah peraturan pelaksana terbit. Karena WP OP dan badan perlu melakukan penyesuaian secara administrasi dan perlu mempelajari terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kekeliruan penerapan. Contoh: mungkin WP perlu membuat aplikasi sistem yang disesuaikan dengan aturan pajak baru sehingga butuh waktu untuk proses pembuatannya.”

● **Kelembagaan Otoritas Pajak**

Sebagian responden berpendapat perlunya pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan. Ada responden yang mengatakan badan penerimaan negara langsung di bawah presiden akan mewujudkan transformasi kelembagaan pajak ke arah positif.

“Penguatan DJP sebagai otoritas resmi pemungut pajak pusat harus didukung penuh oleh pemerintah yang akan datang. Menjadikan DJP sebagai satu badan independen dapat menjadi kajian. Dari sisi pajak daerah, pengelolaan pajak daerah oleh pemda juga harus didukung dengan dinas/lembaga terkait yang memiliki misi transformatif yang serupa.”

● **Peningkatan Kepercayaan Wajib Pajak**

Sebagian responden menyerukan perlunya peningkatan kepercayaan dari masyarakat, terutama wajib pajak. Beberapa responden menilai perlu ada lembaga khusus yang independen untuk mengawasi kinerja DJP, terutama terkait dengan integritas pegawai.

“Poin terpenting dalam meningkatkan *tax ratio* adalah menciptakan kepercayaan kepada wajib pajak melalui pengelolaan pajak yang amanah.”

● **Penyederhanaan Urusan Administrasi**

Sejumlah responden menyerukan penyederhanaan urusan administrasi perpajakan. Dengan demikian, ada harapan penurunan *cost of compliance*. Penggunaan teknologi, termasuk sistem inti administrasi perpajakan (SIAP), memunculkan harapan sistem lebih baik.

“Pemerintah harus terus berinovasi dalam administrasi pajak, termasuk penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan pajak, pembayaran, dan post audit. Ini akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengumpulan pajak.”

● **Penyusunan Target Penerimaan**

Beberapa responden berpendapat penentuan target penerimaan pajak ke depan harus selalu melihat kondisi dan proyeksi perekonomian. Harapannya, target penerimaan diikuti upaya pengamanan target sesuai dengan potensi riilnya.

“Sistem perpajakan yang lebih adil dan target pajak yang lebih realistis. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu naik. Pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi.”

Kemampuan Sumber Daya Manusia

- Sebagian responden juga menyoroti perlunya pelatihan atau peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) otoritas pajak. Hal ini dinilai penting, terutama ketika ada sejumlah aturan baru yang segera diberlakukan. Dalam konteks ini, pegawai berperan dalam fungsi edukasi.

“Jadikan SDM otoritas pajak untuk mengedepankan sisi edukasi agar kepatuhan pajak meningkat. Hal ini dikarenakan tidak semua WP melakukan kesalahan secara sengaja, tetapi memang karena keterbatasan pengetahuan.”

● **Penggunaan Pajak untuk Merespons Lingkungan**

Beberapa responden berharap pemerintah segera merespons isu lingkungan dengan pajak. Terlebih, isu lingkungan sedang menjadi sorotan dalam tataran global. Pemerintah dapat lebih serius menerapkan kebijakan lingkungan salah satunya melalui pendekatan pajak (*green tax*).

“Salah satu jenis *green tax* yang dapat dimaksimalkan adalah pajak karbon. Terlebih, isu menjaga lingkungan (rendah emisi) juga telah merambah ke berbagai sektor, baik transportasi yang mengarah ke kendaraan listrik, maupun sektor perekonomian misalnya ekspor dan impor.”

● **Keadilan dalam Sistem Perpajakan**

Sebagian responden berharap pemerintahan mendatang dapat menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Penciptaan keadilan itu bisa dilakukan dengan penggunaan sistem yang terintegrasi sehingga dapat mengidentifikasi dan mengawasi semua aktivitas ekonomi, termasuk pelaku media sosial.

“Dapat menciptakan keadilan dalam pembayaran pajak bagi yang berpenghasilan tinggi dan rendah serta mampu menaikkan penerimaan negara atau *tax ratio* dengan tetap menjaga *fairness*.”



Survei

Pajak dan Politik
DDTCNews

Profil

DDTCNews adalah portal berita perpajakan yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat perpajakan Indonesia pada khususnya.

Portal ini berisi berita, analisis dan informasi perpajakan lain yang dikelola secara profesional dengan memperhatikan kaidah dan prinsip jurnalistik.

DDTCNews merupakan bagian dari DDTC yang didirikan untuk mencapai misi khusus antara lain:

1. Menyediakan informasi perpajakan yang komprehensif dan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi di masyarakat yang meningkatkan biaya kepatuhan perpajakan.
2. Memengaruhi dan memberikan kontribusi dalam proses perumusan kebijakan perpajakan untuk membangun sistem perpajakan yang seimbang dan melayani seluruh kepentingan.
3. Menyediakan data dan materi perpajakan yang mudah diakses dan dimengerti untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat literasi perpajakan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses link berikut ini:

<https://bit.ly/ProfilDDTCNews2023>



“

Aspirasi masyarakat wajib pajak perlu menjadi acuan bagi partai politik dan calon presiden untuk menyusun agenda perpajakan.

Partai politik dan calon presiden juga perlu menyampaikan agenda perpajakannya dengan jelas dan pasti kepada publik.

Jangan sampai ada kebijakan perpajakan strategis yang terkait dengan subjek, objek, tarif, dan kelembagaan muncul tiba-tiba pada periode kepemimpinan.

”

“No taxation without representation.”

-James Otis Jr-



DDTCNews
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia

Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699

news.ddtc.co.id

DDTCNews DDTCNews @DDTCNews @DDTCNews news.ddtc